



LAPORAN PELAKSANAAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
(LP2KD)
KABUPATEN MALAKA



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BP4D)
KABUPATEN MALAKA
TAHUN 2022

Pantai Motadikin



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya, **Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Malaka tahun 2022** ini dapat berjalan dengan baik dan telah selesai di susun. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, diperlukan langkah-langkah strategis, komprehensif dan berkelanjutan agar berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Oleh karena itu, pemantauan terhadap program penanggulangan kemiskinan yang telah dan sedang dilaksanakan menjadi hal yang mutlak dan penting untuk dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja dan dapat menjadi umpan balik perencanaan penanggulangan kemiskinan pada tahun berikutnya.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). TKPK Daerah ini berfungsi sebagai mitra kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan, dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerahnya masing-masing sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh TNP2K. Hasil pelaksanaan tugas tersebut masing-masing dilaporkan oleh TKPK Provinsi kepada Gubernur dan TNP2K dan oleh TKPK Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota dan TKPK Provinsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami TKPK Kabupaten Malaka menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Malaka Tahun 2022 dalam melaksanakan tugas melakukan koordinasi penanggulangankemiskinan daerah, dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Malaka Tahun 2022.

Akhirnya, semoga Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2022 ini bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya serta secara khusus berguna bagi Pemerintah Kabupaten Malaka dalam upaya merealisasikan percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Malaka guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Malaka yang sejahtera.

Betun, 31 Desember 2022
Kepala BP4D Kabupaten Malaka,

Raymon Yani Baria, SE, M.Ec.Dev.
Pembina
NIP. 19770930 200501 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		2
DAFTAR ISI		3
BAB I	PENDAHULUAN	4
1.1.	Latar Belakang	4
1.2.	Landasan Hukum	5
1.3.	Maksud dan Tujuan	6
1.4.	Sistematika Penulisan Dokumen.....	7
BAB II	KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	8
2.1.	Anggaran untuk Penanggulangan Kemiskinan	8
2.2.	Hambatan dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan	8
2.3.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	9
2.4.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi untuk Penanggulangan Kemiskinan	9
BAB III	CAPAIAN KINERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN	11
3.1.	Program Penanggulangan Kemiskinan	11
	3.1.1. Pemerintah Kabupaten Malaka	11
	3.1.2. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	24
3.2.	Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan	31
3.3.	Capaian Kinerja Tahunan	35
BAB IV	RENCANA TINDAK LANJUT	59
BAB V	PENUTUP	64
5.1.	Kesimpulan	64
5.2.	Rekomendasi	65

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan saat ini telah menjadi salah satu isu global karena masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah yang di hadapi oleh berbagai negara di dunia. Bank Dunia baru saja merilis laporan terkait perkembangan pengentasan kemiskinan dunia dimana dalam laporan tersebut menguraikan bahwa pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia telah membuat kemunduran terbesar dalam upaya pengurangan kemiskinan secara global (World Bank, 2022). Dengan melihat bahwa persoalan kemiskinan telah menjadi masalah yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia maka permasalahan kemiskinan telah menjadi agenda utama dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan menjadi tujuan pertama dari 17 tujuan SDGs yaitu “Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Di Mana Pun” (*End poverty in all its forms everywhere*).

Diskusi terkait kemiskinan di dunia saat ini telah ditempatkan dalam kerangka multidimensional dimana kemiskinan tidak hanya di pandang dari indikator ekonomi (pendapatan) saja tetapi telah diperluas dengan memasukkan indikator lainnya seperti sosial dan budaya (pendidikan dan kesehatan). Sejalan dengan hal tersebut diatas, Indonesia di dalam RPJPN 2005-2025 juga telah menempatkan masalah kemiskinan dalam kerangka multidimensional dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain (i) kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin; (ii) menyangkut ada/tidak adanya pemenuhan hak dasar warga dan ada/tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Permasalahan kemiskinan yang bersifat multidimensional ini membuat pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan strategi untuk penanganan kemiskinan di Indonesia. Salah satunya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui upaya untuk menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SPK) yang dilakukan untuk mencapai sasaran (i) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, (ii) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, (iii) membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Kemudian strategi-strategi tersebut dijabarkan dalam berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan mulai dari penyediaan kebutuhan pangan, penyediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, perluasan kesempatan kerja, pembangunan sektor pertanian, peternakan dan perikanan, bantuan modal usaha melalui dana bergulir, dan berbagai upaya pendampingan bagi masyarakat miskin.

Berbagai kebijakan prioritas Penanggulangan Kemiskinan tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 kemudian di jabarkan pelaksanaannya dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah dengan target penurunan angka kemiskinan menjadi 1 digit yaitu tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,5%-7%. Sejalan dengan isu strategis terkait kemiskinan secara nasional, isu terkait kemiskinan juga menjadi salah satu isu strategis dalam RPJP Provinsi NTT 2005-2025. Hal ini kemudian dijabarkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, dimana isu kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama yang harus segera di tangani

oleh Pemerintah Provinsi NTT karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa Provinsi NTT menempati urutan ke 3 sebagai Provinsi dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi setelah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Persoalan Kemiskinan yang juga dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka adalah terkait ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya antara lain adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, ketidakmampuan untuk mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan, perumahan yang tidak layak huni, masalah pemenuhan air minum, listrik dan sanitasi. Dengan melihat permasalahan kemiskinan yang kompleks dan lintas sektoral tersebut maka upaya penurunan angka kemiskinan juga membutuhkan sinergi, koordinasi dan kolaborasi lintas sektor yaitu antara Pemerintah Pusat dan Daerah, swasta,kelembagaan sosial kemasyarakatan dan lembaga keagamaan.

Dalam rangka meningkatkan sinergi, koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanganan kemiskinan di daerah maka Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 yang mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di daerah. TKPK ini berfungsi sebagai mitra kerja TNP2K yang bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan, dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerahnya masing-masing. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, salah satu agenda tahunan TKPK Daerah adalah menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD). Maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tersebut maka TKPK Kabupaten Malaka berkewajiban untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Malaka untuk tahun 2022. Laporan ini dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Malaka sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dan perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Malaka.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Malaka Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Tahun 2018–2023;
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Strategi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi NTT Tahun 2016-2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2022 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Malaka Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2022 Nomor 60);
15. Surat Keputusan Bupati Malaka Nomor 43/HK/2022 tentang Tim Koordinasi dan Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Malaka Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Malaka Tahun 2022 adalah :
 - a. Sebagai laporan terhadap kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Malaka Tahun 2022;
 - b. Sebagai bahan evaluasi dan masukkan dalam rangka perencanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Malaka untuk tahun-tahun yang akan datang.
2. Tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Malaka Tahun 2022 adalah :
 - a. Untuk memberikan gambaran terkait perkembangan pelaksanaan dan capaian kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Malaka Tahun 2022;

- b. Untuk memberikan gambaran tentang kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Malaka Tahun 2022;
- c. Untuk memberikan rekomendasi serta saran dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Malaka.

1.4. Sistematika Penulisan Dokumen

Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. **Bab I Pendahuluan**

Pada bagian ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan laporan ini.

2. **Bab II Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan**

Pada bagian ini menguraikan tentang anggaran untuk penanggulangan kemiskinan, hambatan dan tantangan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, penanganan pengaduan masyarakat, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk penanggulangan kemiskinan.

3. **Bab III Capaian dan Analisis**

Pada bab ini menguraikan tentang program penanggulangan kemiskinan dan capaian kinerja penanggulangan kemiskinan.

4. **Bab IV Rencana Tindak Lanjut**

Pada bagian ini diisi dengan informasi dan penjelasan rencana tindak lanjut yang dilakukan. Rencana tindak lanjut ini dapat dirumuskan berdasar pada Perangkat Daerah pelaksana program atau berdasarkan isu-isu program-program tertentu agar adanya perbaikan di tahun yang akan datang.

5. **Bab V Penutup**

Pada bagian penutup ini berisikan Kesimpulan dan Rekomendasi. Rekomendasi yang disampaikan merupakan rekomendasi atas seluruh temuan baik isu kebijakan, isu kelembagaan, isu pelaksanaan, maupun hasil monitoring dan evaluasi.

BAB II KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2.1. Anggaran untuk Penanggulangan Kemiskinan;

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Malaka Tahun 2022 sebesar Rp. 285.244.192.496, anggaran tersebut melalui intervensi melalui bidang-bidang yang dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2022

No.	Urusan	Alokasi Belanja Pro Poor (Rp.)
1.	Pendidikan	37.216.188.180
2.	Kesehatan	152.278.598.863
3.	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	50.528.261.637
4.	Perumahan & Kawasan Permukiman	6.988.959.000
5.	Sosial	2.252.562.500
6.	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	3.382.829.620
7.	Ketahanan Pangan & Perikanan	866.636.486
8.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	605.800.000
9.	Pertanian	24.167.129.990
10.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.816.622.920
11.	Koperasi dan UKM	140.603.300
J U M L A H		285.244.192.496

2.2. Hambatan dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan

Hambatan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Malaka adalah :

1. Data kemiskinan belum valid yang menyebabkan tidak tepat sasaran pemberian bantuan;
2. Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak kegiatan usaha yang berhenti sehingga lapangan kerja dan akses sumber pendapatan bagi masyarakat miskin tertutup;
3. Belum optimalnya peran Tim Koordinasi dan Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK);
4. Belum adanya Koordinasi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah dalam Penanganan Kemiskinan karena masih adanya ego sektoral.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Malaka antara lain :

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya mengubah suatu keadaan atau kondisi masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan belum memiliki konsep yang tepat sehingga upaya tersebut belum tercapai;

2. Pola pikir dan mental miskin masyarakat;
Sebagian kecil masyarakat Kabupaten Malaka khususnya kalangan warga yang tidak mampu, cenderung mempunyai pola pikir dan mental miskin, sehingga kurang produktif, kurang tekun, kurang serius bekerja, tidak memiliki keberanian untuk memulai usaha dan mengharapkan bantuan Pemerintah;
 3. Pandemi Covid -19, Kondisi ini rentan bertambahnya penduduk miskin karena lapangan pekerjaan terbatas, pendapatan turun drastis, dan lapangan usaha tidak mudah diakses;
 4. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus diperbaharui secara periodik dengan rentang periode waktu tertentu, atau DTKSnya terus terupdate agar didapatkan data yang valid sehingga pemberian bantuan tepatsasaran.
 5. Kurang optimalnya peran Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK).
- 2.3. Penanganan Pengaduan Masyarakat
Penanganan Pengaduan Masyarakat dibentuk sebagai wadah untuk menampung aspirasi, kepedulian dan pengaduan atas penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan. Penanganan pengaduan dapat dilakukan melalui tingkat desa hingga kabupaten, namun sampai dengan saat ini Tim penanggulangan kemiskinan yang sudah terbentuk hanya berada di tingkat Provinsi dan Kabupaten tetapi untuk Desa/Kelurahan belum terbentuk hingga saat ini.
- 2.4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi untuk Penanggulangan Kemiskinan;
Monitoring dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Masyarakat miskin. Sedangkan kegiatan evaluasi dimaksudkan untuk memberikan penilaian program, kegiatan, dan kebijakan yang telah disepakati. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan monitoring evaluasi kebijakan Penanggulangan Kemiskinan adalah :
1. Obyektif dan Profesional;
 2. Transparan;
 3. Partisipatif;
 4. Akuntabel;
 5. Tepat Waktu;
 6. Berkesinambungan;
 7. Berbasis Indikator Kinerja.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh TKPK Kabupaten Malaka terhadap kegiatan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan, sebagai berikut :

1. Evaluasi dan Sinkronisasi Dokumen-dokumen Perencanaan
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026;
 - b. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
 - c. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) terkait dengan program Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. Pada tahap ini, TKPK Kabupaten Malaka dan Perangkat Daerah akan mengevaluasi dan mensinkronisasi dokumen perencanaan untuk memastikan bahwa program-program kemiskinan yang tercantum pada Rencana Aksi Tahunan Kabupaten Malaka terakomodir dalam dokumen perencanaan Pembangunan.

2. Monitoring dan Evaluasi Program Kemiskinan
Dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan program yang telah dilaksanakan, sebagai berikut :
 - a. Dilaksanakan dengan memperhatikan isu gender dan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya yang dilakukan secara rutin/berkala sesuai kebutuhan (tematik);
 - b. Kegiatan monitoring dilakukan setiap bulan dan evaluasi dilakukan setiap triwulan untuk melihat efektifitas pelaksanaan program;
 - c. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Ketua TKPK Kabupaten Malaka.
3. Tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi yaitu untuk perbaikan dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan program percepatan.

BAB III
CAPAIAN KINERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

3.1. Program Penanggulangan Kemiskinan

3.1.1 Pemerintah Kabupaten Malaka

Kebijakan penanggulangan kemiskinan ini merupakan bagian dari perencanaan pemerintah Kabupaten Malaka yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Malaka Tahun 2022-2026 khususnya pada Misi I “**Terwujudnya Kabupaten Malaka Yang Sejahtera, Berbudaya, dan Berdaya Saing**”. Yang kemudian diimplementasikan dalam program dan kegiatan serta alokasi anggaran baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah. Di tingkat pemerintah daerah Kabupaten Malaka, berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui 16 (enam belas) urusan pemerintah daerah seperti yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Malaka Tahun 2022

No.	Urusan	Alokasi Belanja Pro Poor (Rp.)
1.	Pendidikan	37.216.188.180
2.	Kesehatan	152.278.598.863
3.	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	50.528.261.637
4.	Perumahan & Kawasan Permukiman	6.988.959.000
5.	Sosial	2.252.562.500
6.	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	3.382.829.620
7.	Ketahanan Pangan & Perikanan	941.937.206
8.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	605.800.000
9.	Pertanian	24.091.829.270
10.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.816.622.920
11.	Koperasi dan UKM	140.603.300
J U M L A H		285.244.192.496

Kabupaten Malaka menganggarkan program penanggulangan kemiskinan yang diimplementasikan melalui 11 (sebelas) urusan pemerintahan, dengan total anggaran sebesar Rp. 285.244.192.496 pada Tahun 2022. Selanjutnya program dan kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan dari masing-masing urusan dirincikan sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

Dukungan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Malaka yang dianggarkan melalui DPPA pada urusan Bidang Pendidikan. Urusan pendidikan merupakan salah satu urusan yang sangat vital dalam upaya pengentasan penduduk miskin di Kabupaten Malaka. Bila melihat pada data bahwa sebagian masyarakat miskin di Kabupaten Malaka memiliki derajat pendidikan yang rendah, sehingga intervensi pada bidang pendidikan merupakan salah satu prioritas daerah dalam upayanya mengentaskan penduduk miskin yang ada di daerah ini melalui dua arah:

pertama: upaya pemerintah daerah dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mengurangi beban keluarga miskin dalam mengakses pendidikan dengan menjamin akses pendidikan gratis pada tingkatan menengah pertama. Inijuga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program wajib belajar 12 tahun yang ditetapkan oleh Pemerintah. *kedua*: menyediakan pendidikan kejuruan (vocational) yang lebih berorientasi kepada pendidikan peserta didik agar siap memasuki pasar kerja selepas sekolah.

Anggaran untuk urusan pendidikan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar : Rp. 37.216.188.180, dialokasikan untuk Program Pengelolaan Pendidikan. Secara rinci alokasi per kegiatan dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel Program Kegiatan Urusan Pendidikan

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu Alokasi (Rp.)
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah, Pembangunan Perpustakaan Sekolah, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Pengadaan Perlengkapan Sekolah, Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan, Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	16.495.912.500
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penambahan Ruang Kelas Baru, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah, Pembangunan Laboratorium, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Pengadaan Perlengkapan Sekolah, Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik, dan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15.367.902.000

	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, dan Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.533.534.000
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.818.839.680

2. Urusan Kesehatan

Salah satu pendorong kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Malaka adalah derajat kesehatan masyarakatnya yang masih rendah relatif terhadap wilayah lain di Indonesia. Data mengenai indeks pembangunan manusia, dimana dimensi kesehatan merupakan salah satu dimensi kuncinya, menunjukkan fakta tersebut. Hubungan kemiskinan dan kesehatan salah satunya terkait dengan ketidakmampuan masyarakat miskin untuk mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang gratis dan berkualitas memiliki kontribusi yang besar terhadap upaya pengentasan penduduk miskin di Kabupaten Malaka.

Dukungan Penanggulangan Kemiskinan pada urusan Kesehatan terdapat pada 2 (dua) Program yaitu Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan dan Program peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan dengan total anggaran pada DPPA TA. 2022 adalah sebesar Rp. 152.278.598.863.

Tabel Program Kegiatan Urusan Kesehatan

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu Alokasi (Rp.)
Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya, Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengadaan Obat, Vaksin, dan Pengadaan Bahan Habis Pakai	28.343.859.916

	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Pengelolaan Surveilans Kesehatan, Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, Operasional Pelayanan Puskesmas, Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya dan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	61.279.165.409
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	111.128.340
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar, Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.571.300.000
Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya, Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Pengadaan Obat, Vaksin	22.981.418.372
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Operasional Pelayanan Rumah Sakit, dan Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun (BLUD)	30.991.726.826

3. Urusan Sosial

Urusan sosial merupakan urusan yang bersentuhan langsung dan paling dekat dengan upaya pengentasan penduduk miskin yang ada di Kabupaten Malaka. Data terkait kemiskinan dan program bantuan-bantuan sosial pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penciptaan jaring pengaman sosial untuk melindungi kelompok miskin dan rentan dilaksanakan dalam urusan ini.

Pada urusan Sosial terdapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan kegiatan yang berfokus pada Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah dan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.252.562.500, dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana.

Tabel Program Kegiatan Urusan Sosial

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu Alokasi (Rp.)
Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	75.000.000
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan dan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	71.942.500
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.854.210.000
Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	251.410.000

4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kemiskinan yang terjadi di wilayah perdesaan adalah kecenderungan yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Malaka sendiri, data menunjukkan bahwa konsentrasi kantong-kantong kemiskinan di Kabupaten Malaka teletak pada wilayah-wilayah perdesaan yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten

Malaka. Salah satu pemicu kemiskinan di perdesaan adalah belum terbangun dan terberdayakannya lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Oleh karena sebab itulah upaya penanggulangan kemiskinan juga dilaksanakan pada urusan pemberdayaan masyarakat desa. Dukungan penanggulangan kemiskinan dari Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa ada pada Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan alokasidana sebesar Rp. 6.816.622.920.

Tabel Program Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu Alokasi (Rp.)
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa, Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.791.682.000
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3.024.940.920

5. Urusan Pertanian

Sektor primer/lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan lapangan usaha terbesar dalam ekonomi Kabupaten Malaka. Sepanjang 2018-2022 lapangan usaha ini mengkomposisi hampir 30% dari total output PDRB Kabupaten Malaka. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan juga merupakan lapangan usaha dimana mayoritas angkatan kerja Kabupaten Malaka bekerja didalamnya. Yang menjadi persoalan adalah kemiskinan justru tersebar luas di wilayah-wilayah perdesaan dimana lapangan kerja ini adalah lapangan kerja yang dominan. Pendapatan dan Produktivitas pekerja yang rendah pada lapangan usaha

primer ini menjadi salah satu dari banyak variabel yang mendorong terciptanya kantong-kantong kemiskinan di daerah. hal inilah yang menjadi alasan utama upaya pengentasan harus dilaksanakan pada urusan pertanian dan ketahanan pangan. Pada urusan Pertanian terdapat 5 (lima) Program yang mendukung penanggulangan kemiskinan yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian dan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. Dari ketujuh program ini terdapat Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya. Kegiatan ini sangat mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan ketahanan pangan. Total dana pada DPPA TA. 2022 sebesar Rp. 24.091.829.270..

Tabel Program Kegiatan Urusan Pertanian

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu Alokasi (Rp.)
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12.112.543.950
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	1.618.144.540
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	8.949.554.000

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	226.940.000
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	306.160.000
Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	953.787.500

6. Urusan Ketahanan Pangan dan Perikanan

Lapangan usaha perikanan juga merupakan lapangan usaha dimana mayoritas angkatan kerja di Kabupaten Malaka bekerja didalamnya. Yang menjadi persoalan adalah kemiskinan justru tersebar luas di wilayah-wilayah perdesaan dimana lapangan kerja ini adalah lapangan kerja yang dominan. Pendapatan dan Produktivitas pekerja yang rendah pada lapangan usaha primer ini menjadi salah satu dari banyak variabel yang mendorong terciptanya kantong-kantong kemiskinan di daerah. hal inilah yang menjadi alasan utama upaya pengentasan harus dilaksanakan pada urusan ketahanan pangan dan perikanan.

Pada urusan Ketahanan Pangan dan Perikanan terdapat 5 (lima) Program yang mendukung penanggulangan kemiskinan yaitu Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Dari kelima program ini terdapat Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. Kegiatan ini sangat mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan ketahanan pangan. Total dana pada DPPA TA. 2022 sebesar Rp. 941.937.206.

Tabel Program Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan dan Perikanan

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu Alokasi (Rp.)
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	61.930.720

Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	13.370.000
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	183.150.000
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	441.124.761
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	242.361.725

7. Urusan Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang sehat dapat menjadi lokomotif yang mendorong masyarakat untuk menjadi lebih produktif, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya mendorong majunya upaya pengentasan penduduk miskin yang ada di daerah ini. Sadar akan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Malaka mendorong upaya pengentasan kemiskinan dilaksanakan Pada Urusan Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pada urusan ini terdapat Program Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) yang diarahkan untuk meningkatkan jumlah Pelaku UMKM yang Memperoleh Bantuan Modal Usaha dengan dukungan dana sebesar Rp. 140.603.300.

Tabel Program Kegiatan Urusan Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu Alokasi (Rp.)
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	70.566.025

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	70.037.275
--	--	--	------------

8. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemerintah berkewajiban menyediakan Sarana dan Prasarana penunjang seperti jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan lokomotif yang mendorong masyarakat untuk menjadi lebih produktif, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya mendorong majunya upaya pengentasan penduduk miskin yang ada di daerah ini. Pada urusan ini terdapat 7 (tujuh) Program yaitu Program Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dari ketujuh program ini dengan dukungan dana sebesar Rp. 50.528.261.637.

Tabel Program Kegiatan Urusan Pekerjaan dan Penataan Ruang

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu Alokasi (Rp.)
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya dan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	894.888.205
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.530.918.966
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	8.692.122.639
Program Pengelolaan dan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	2.083.859.017

Pengembangan Sistem Air Limbah	dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan, Pembangunan Jalan, dan Pemeliharaan Rutin Jalan	34.875.090.910
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	65.623.900
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	52.630.000
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1.333.128.000

9. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah urusan pendukung lainnya yang juga turut menentukan dan mendorong upaya pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Malaka melalui data jumlah rumah tangga miskin yang terdata pada Sistem Administrasi Kependudukan.

Pada urusan ini terdapat beberapa Program dan kegiatan yaitu Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Untuk urusan didukung dengan dana sebesar Rp. 605.800.000.

Tabel Program Kegiatan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu Alokasi (Rp.)
Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	451.270.000
Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	124.610.000
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	29.920.000

10. **Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
 Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah urusan pendukung lainnya yang juga turut menentukan dan mendorong upaya pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Malaka. Dengan adanya Program Pemetaan dan Pengendalian Penduduk dapat diketahui jumlah rumah tangga miskin yang menjadi sasaran pelaksanaan program.
 Pada urusan ini terdapat beberapa Program dan kegiatan yaitu Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Untuk urusan didukung dengan dana sebesar Rp. 3.382.829.620.

Tabel Program Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu Alokasi (Rp.)
Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga dan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	91.329.200
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal, Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang, Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok), Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK dan Pengendalian Program KKBPK	623.541.500
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	608.424.000

	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	294.050.000
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	292.825.000
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.222.660.000

11. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Salah satu hal mendasar yang menjadi prioritas utama Pemerintah dalam upaya pengentasan penduduk miskin yang ada di daerah ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kategori miskin akan rumah yang layak dihuni.

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendorong majunya upaya pengentasan penduduk miskin yang ada di daerah ini terdapat pada beberapa Program berikut yaitu Program Kawasan Permukiman, dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Dari kedua program tersebut dengan dukungan dana sebesar Rp. 6.988.959.000.

Tabel Program Kegiatan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu Alokasi (Rp.)
Program Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	2.550.000

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	6.986.409.000
---	--------------------------------------	--	---------------

3.1.2 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Malaka juga didukung melalui program/kegiatan 9 (sembilan) lintas Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Program/kegiatan serta alokasi anggaran difokuskan untuk penurunan beban pengeluaran melalui bantuan sosial tunai dan tunai, serta program pemberdayaan yang terkategori menjadi 4 (empat) Klaster yakni Padat Karya, Pelatihan, UMKM dan Vokasi. Rincian Program/Kegiatan dan alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Rincian Anggaran Penanggulangan Kemiskinan

No.	Urusan	Alokasi Belanja Pro Poor (Rp.)
1.	Pendidikan	1.990.192.996.459
2.	Kesehatan	127.182.906.859
3.	Sosial	2.015.000.000
4.	PMD	36.578.322.110
5.	Pertanian dan Ketahanan Pangan	24.833.739.995
6.	Kelautan dan Perikanan	4.777.600.000
7.	Koperasi, Tenaga Kerja	268.706.400.000
8.	Transmigrasi	129.800.000
9.	Energi dan Sumber Daya Mineral	375.200.000
Total		2.454.791.965.423

Sumber : DPPA Prov. NTT TA 2022

1. Urusan Pendidikan

Dukungan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi NTT yang dianggarkan melalui DPPA pada urusan Bidang Pendidikan. urusan pendidikan merupakan salah satu urusan yang sangat vital dalam upaya pengentasan penduduk miskin di NTT. bila melihat pada data bahwa sebagian masyarakat miskin di NTT memiliki derajat pendidikan yang rendah, intervensi pada bidang pendidikan merupakan salah satu prioritas daerah dalam upayanya mengentaskan penduduk miskin yang ada di daerah ini melalui dua aras : pertama: upaya pemerintah daerah dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mengurangi beban keluarga miskin dalam mengakses pendidikan dengan menjamin akses pendidikan gratis pada tingkatan menengah atas. Inijuga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program wajib belajar 12 tahun yang ditetapkan oleh Pemerintah. kedua: menyediakan pendidikan kejuruan (vocational) yang lebih berorientasi kepada pendidikan peserta didik agar siap memasuki pasar kerja selepas

sekolah.

Untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.990.192.996.459,- yang dialokasikan untuk Program Pengelolaan Pendidikan. Secara rinci alokasi per kegiatan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel Program Kegiatan Urusan Pendidikan

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	537.542.585.069
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	311.202.709.728
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.141.447.701.662

Sumber: DPPA TA 2022

Program Pengelolaan Pendidikan terfokus kepada 3 (tiga) kegiatan besar sesuai dengan kewenangan provinsi yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 537.542.585.069, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 311.202.709.728, dan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.141.447.701.662,-.

2. Urusan Kesehatan

Salah satu pendorong kemiskinan yang tinggi di NTT adalah derajat kesehatan masyarakatnya yang masih rendah relatif terhadap wilayah lain di Indonesia. data mengenai indeks pembangunan manusia, dimana dimensi kesehatan merupakan salah satu dimensi kuncinya, menunjukkan fakta tersebut. hubungan kemiskinan dan kesehatan salah satunya terkait dengan ketidakmampuan masyarakat miskin untuk mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. oleh karena itu upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang gratis dan berkualitas memiliki kontribusi yang besar terhadap upaya pengentasan penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur.

Dukungan Penanggulangan Kemiskinan pada urusan Kesehatan terdapat pada 2 (dua) Program yaitu Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan dan Program peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan dengan total anggaran pada DPPA TA. 2021 adalah sebesar Rp. 127.182.906.859,-

Tabel Program Kegiatan Urusan Kesehatan

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)
Program Peningkatan Aksesibilitas Dan Kualitas Layanan Kesehatan	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (PengadaanPMT Bumil KEK)	10.671.885.000

Program Peningkatan Aksesibilitas Dan Kualitas Layanan Kesehatan	penyelidikan epidemiologi 125 malaria	210.000.000
Program Peningkatan Aksesibilitas Dan Kualitas Layanan Kesehatan	Pengadaan Logistik DBD	50.050.000
Program Peningkatan Aksesibilitas Dan Kualitas Layanan Kesehatan	Biaya pemeriksaan viral load, terutama untuk ODHA yang telah mendapat ART selama 12 bulan pengobatan untuk 440 odha @450.00	243.450.000
Program Peningkatan Aksesibilitas Dan Kualitas Layanan Kesehatan	Pengadaan Makanan Tambahan Balita Kurus	5.045.760.000
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3	108.455.810.589
Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Honor PTT Puskesmas, UPT, RS Jiwa Naimata dan RS Undana	2.505.951.270

Sumber: DPPA TA 2022

Pada Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan terdapat 6 (enam) kegiatan dimana kegiatan dengan dana terbesar ada pada Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Indikator Terlaksananya makanan tambahan Bumil KEK sebesar Rp. 10.671.885.000, Pengadaan Makanan Tambahan Balita Kurus sebesar Rp. 5.045.760.000 dan Iuran jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp. 108.455.810.589. Sedangkan Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan lebih diutamakan untuk pendukung operasional yaitu Kegiatan Honor PTT Puskesmas, UPT, RS Jiwa Naimata dan RS Undana sebesar Rp. 2.505.951.270.

3. Urusan Sosial

Urusan sosial merupakan urusan yang bersentuhan langsung dan paling dekat dengan upaya pengentasan penduduk miskin yang ada di NTT. data terkait kemiskinan dan program bantuan-bantuan sosial pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penciptaan jaring pengaman sosial untuk melindungi kelompok miskin dan rentan dilaksanakan dalam urusan ini.

Pada urusan Sosial terdapat Program Pelayanan Sosial dengan kegiatan yang berfokus pada Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.015.000.000, dengan Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Tabel Program Kegiatan Urusan Sosial

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)
Program Pelayanan Sosial	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	2.015.000.000

Sumber: DPPA TA 2022

4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Kemiskinan yang terjadi di wilayah perdesaan adalah kecenderungan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. data menunjukkan bahwa konsentrasi kantong-kantong kemiskinan di NTT teletak pada wilayah-wilayah perdesaan yang tersebar di berbagai Kabupaten di NTT. salah satu pemicu kemiskinan di perdesaan adalah belum terbangun dan terberdayakannya lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. oleh karena sebab itulah upaya penangglulangan kemiskinan juga dilaksanakan pada urusan pemberdayaan masyarakat desa. Dukungan penanggulangan kemiskinan dari Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa ada pada Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan alokasidana sebesar Rp. 36.578.322.110.

Tabel Program Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)
Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukumadat	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Provinsi serta Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah Kabupaten/Kota	36.578.322.110

Sumber: DPPA TA 2022

5. Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan
- Sektor primer/lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan lapangan usaha terbesar dalam ekonomi Nusa Tenggara Timur. Sepanjang 2018-2021 lapangan usaha ini mengkomposisi hampir 30% dari total output PDRB NTT. Lapangan usaha pertanian, kehutnan dan perikanan juga merupakan lapangan usaha dimana mayoritas angkatan kerja NTT bekerja didalamnya. yang menjadi persoalan adalah kemiskinan justru tersebar luas di wilaya-wilayah perdesaan dimana lapangan kerja ini adalah lapangan kerja yang dominan. Pendapatan dan Produktivitas pekerja yang rendah pada lapangan usaha primer ini menjadi salah satu dari banyak variabel yang mendorong terciptanya kantong-kantong kemiskinan di daerah. hal inilah yang menjadi alasan utama

upaya pengentasan harus dilaksanakan pada urusan pertanian dan ketahanan pangan. Pada urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan terdapat 4 (empat) Program yang mendukung penanggulangan kemiskinan yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian dan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. Dari keempat program ini terdapat Kegiatan Pertanian Terintegrasi Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) yang mendukung pengembangan komoditas jagung sekaligus diintegrasikan dengan pengembangan ternak sapi dan ternak sedang (Kambing) atau ternak kecil seperti Ayam KUB Petelur. Kegiatan ini sangat mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan ketahanan pangan. Total dana pada DPPA TA. 2021 sebesar Rp. 24.833.739.995.

Tabel Program Kegiatan Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan, Penyediaan Peredaran Mutu Benih/Bibit Tanaman Pangan	6.013.195.510
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	16.129.244.485
Program Penyuluhan Pertanian	Kerjasama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	2.200.000.000
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan Peredaran Bibit, Benih ternak serta kewenangan Provinsi dalam pengendalian penyediaan dan produksi bibit/ benih ternak	491.300.000

Sumber: DPPA TA 2022

6. Urusan Kelautan dan Perikanan

Sebagaimana pada urusan pertanian dan ketahanan pangan, upaya pengentasan penduduk miskin pada urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan berdasar pada fakta bahwa pendapatan dan produktivitas yang rendah pada bidang kelautan dan perikanan di NTT juga menjadi salah satu pendorong luasnya kemiskinan di daerah ini. hal lainnya adalah fakta bahwa potensi perikanan dan kelautan di NTT sebenarnya dapat menjadi salah satu senjata bagi daerah untuk memerangi kemiskinan di daerah ini mengingat potensinya sebagai wilayah kepulauan. setidaknya terdapat dua strategi penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan daerah ini pada urusan kelautan dan perikanan: pertama, peningkatan nilai tambah produk-produk kelautan dan perikanan agar dapat mendorong peningkatan income masyarakat nelayan dan kedua: kampanye konsumsi ikan bagi bumil dan balita untuk meningkatkan status gizi masyarakat. Dukungan penanggulangan kemiskinan dari Urusan Kelautan dan Perikanan mencakup 2

(dua) program yaitu Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan total dana sebesar Rp. 4.777.600.000. Dari total dana ini, terdapat dana yang signifikan sebesar Rp. 4.497.600.000. yang digunakan untuk mendukung Ibu-ibu hamil dan Balita di Desa Stunting yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota pada Kegiatan Sistem Informasi dan Promosi Produk olahan Perikanan dalam rangka safari/kampanye Gemarikan.

Tabel Program Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)
Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Pengadaan BantuanCool Box	195.000.000
	Sistem Informasi dan Promosi Produk olahan Perikanan dalam rangka safari/kampanyeGemarikan	4.497.600.000
Program Nilai tambah dan daya saing industry	pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan	85.000.000

Sumber: DPPA TA 2022

7. Urusan Koperasi dan Tenaga Kerja

Lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang sehat dapat menjadi lokomotif yang mendorong masyarakat untuk menjadi lebih produktif, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya mendorong maju upaya pengentasan penduduk miskin yang ada di daerah ini. sadar akan hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTT mendorong upaya pengentasan kemiskinan dilaksanakan Pada Urusan Koperasi dan Tenaga Kerja.

Pada urusan ini terdapat Program Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) yang diarahkan untuk meningkatkan jumlah Pelaku UMKM yang Memperoleh Bantuan Modal Usaha dengan dukungan dan sebesar Rp. 268.706.400.000.

Tabel Program Kegiatan Urusan Koperasi dan Tenaga Kerja

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)
Program Pemberdayaan Usaha MenengahKecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomidan Pengentasan Kemiskinan	268.706.400.000

Sumber: DPPA TA 2022

8. Urusan Transmigrasi

Pada urusan Transmigrasi terdapat Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan kegiatan utama Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi / Pemandahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi dengan dukungan dana sebesar Rp. 129.800.000.

Pembangunan kawasan transmigrasi dan penataan persebaran penduduk berkontribusi terhadap upaya pengentasan penduduk miskin di Provinsi NTT, karena salah satu sebab kemiskinan di NTT adalah sulitnya program dan kegiatan pengentasan penduduk miskin menjangkau kelompok-kelompok miskin dan rentan yang tinggal pada wilayah-wilayah yang terpencil dan terisolasi. melalui program pembangunan kawasan transmigrasi dan kegiatan penataan persebaran penduduk ini diharapkan mempermudah pemerintah daerah dalam memberikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat yang termasuk dalam kelompok miskin dan rentan dan memudahkan masyarakat miskin dalam mengakses layanan pemerintah daerah.

Tabel Program Kegiatan Urusan Urusan Transmigrasi

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi / Pemandahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	129.800.000

Sumber: DPPA TA 202

9. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Ketersediaan energi yang memadai akan menjadi salah satu faktor penting dalam upaya mendorong peningkatan produktivitas masyarakat. dapat dikatakan bahwa amat sulit untuk berharap peningkatan produktivitas ketika masih banyak rumah tangga yang tidak memiliki dukungan listrik, misalnya. oleh sebab itu pemenuhan kebutuhan energi menjadi sangat vital dalam upaya peningkatan produktivitas masyarakat, peningkatan pendapatan, dan karenanya pengentasan penduduk miskin di NTT.

Dukungan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral untuk penanggulangan kemiskinan ada pada Program Ketenagalistrikan dengan Kegiatan utama Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana penyediaan Tenaga Listrik belum berkembang, Daerah terpencil dan Pedesaan untuk mencapai Rasio Elektrifikasi. Dengan demikian, tercapai upaya pengembangan wilayah untuk mengurangi

kesenjangan dan menjamin pemerataan melalui pelayanan bantuan instalasi sambungan rumah bagi masyarakat tidak mampu. Total alokasi dana DPPA TA. 2021 sebesar Rp. 375.200.000.

Tabel Program Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)
Program Ketenagalistrikan	Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana penyediaan Tenaga Listrik belum berkembang, Daerah terpencil dan Pedesaan	375.200.000

Sumber: DPPA TA 202

3.2. Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan

Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan diukur dari 5 (lima) Indikator Kemiskinan Konsumsi antara lain Persentase Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan serta Garis Kemiskinan.

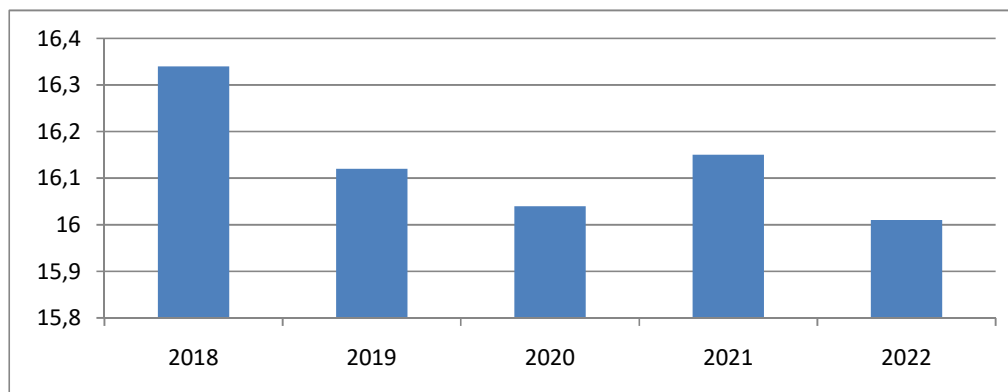
Sumber data yang selama ini digunakan yakni hasil SUSENAS yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan pada bulan Maret dan September setiap tahunnya. Selain indikator kemiskinan konsumsi dimaksud, indikator kemiskinan sektoral juga menjadi indikator multidimensi dalam mengevaluasi capaian penanggulangan kemiskinan.

Pada laporan ini hanya disajikan capaian Indikator Kemiskinan Konsumsi yang dirincikan sebagai berikut:

3.2.1. Persentase Penduduk Miskin

Presentase penduduk miskin di Kabupaten Malaka selama 5 Tahun dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada Grafik berikut ini:

Grafik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Malaka



Sumber: BPS Kab. Belu, Malaka Dalam Angka

Persentase penduduk miskin Kabupaten Malaka pada Tahun 2018 sebesar 16,34%, kemudian di tahun berikutnya Tahun 2019 turun sebesar 0,22% menjadi 16,12%. Pada Tahun 2020 turun lagi 0,08% menjadi 16,04%, kemudian di Tahun 2021 akibat dampak dari covid-19 yang melanda dunia, persentasenya naik lagi menjadi 16,15% dan di Tahun 2022 menurun menjadi 16,01%.

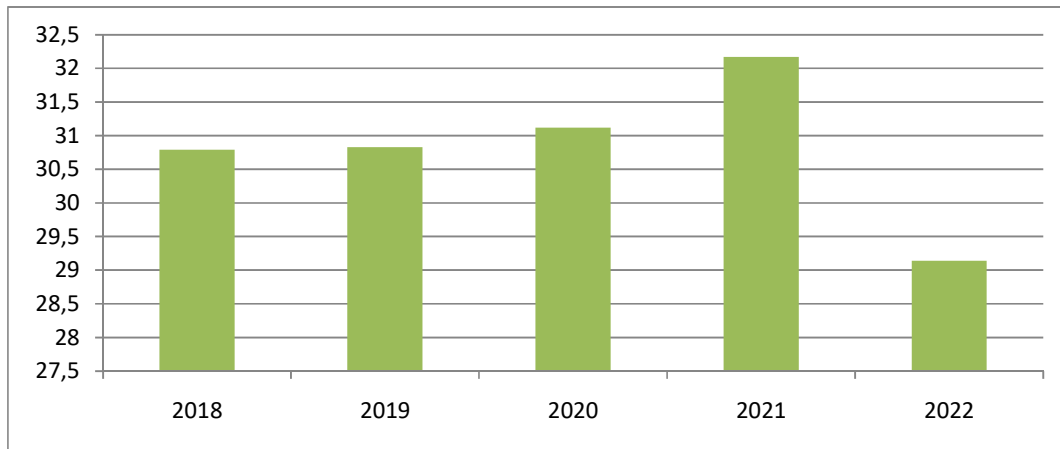
Persentase penduduk miskin di tingkat Provinsi NTT pada Tahun 2020, 2021, hingga 2022 secara nasional pun NTT masih berada dibawah capaian Nasional yaitu 9,22% pada Tahun 2019, 10,19% pada Tahun 2020, 9,71% pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 per Maret sebesar 9,54%.

3.2.2. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Malaka selama 5 tahun terakhir ini terlihat bahwa pada Tahun 2018 sebanyak 30,79 ribu orang, di Tahun 2019 naik sebesar 30,83 ribu orang, sedangkan di Tahun 2020 naik lagi menjadi 31,12 ribu orang. Kemudian pada Tahun 2021 naik lagi menjadi 32,17 ribu orang, dan pada Tahun 2022 menurun pada angka 29,13 ribu orang.

Perkembangan jumlah Penduduk miskin dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 di Kabupaten Malaka dapat di lihat pada Grafik berikut ini:

Grafik Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Malaka Tahun 2018-2022
(Satuan Ribuan)



Sumber: BPS Kab. Belu, Malaka Dalam Angka

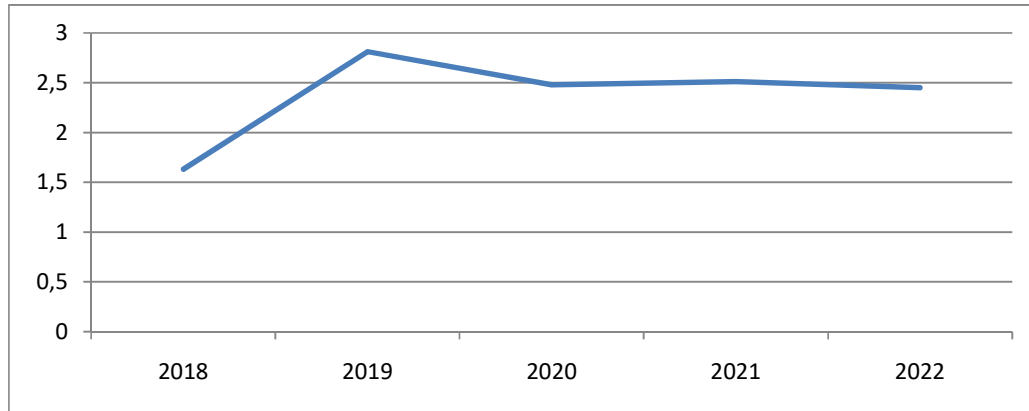
Di Tahun 2022, penurunan jumlah penduduk miskin disebabkan sejumlah faktor, di antaranya, perekonomian triwulan pertama pada 2022, tumbuh sebesar 1,62 persen. Angka ini meningkat dibanding capaian triwulan pertama pada 2021 yang hanya tumbuh sebesar 0,22 persen. Selanjutnya, pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan pertama 2022 tumbuh sebesar 0,80 persen meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2021 yang berkontraksi sebesar 3,26 persen.

Faktor yang juga berdampak terhadap penurunan ini yaitu laju inflasi umum tercatat menurun selama periode Januari-Maret 2022, yaitu dari 1,01 persen pada Januari 2022 menjadi 0,15 pada Maret 2022.

3.2.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kemiskinan Provinsi NTT dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada Grafik 3.3.berikut:

Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Malaka Periode: 2018-2022



Sumber: BPS Kab. Belu (Malaka Dalam Angka)

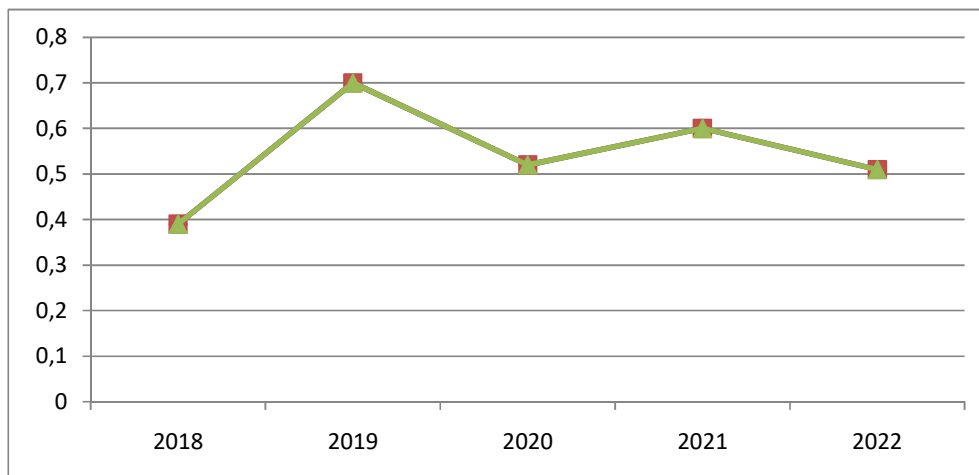
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Malaka pada pertengahan Tahun 2022 sebesar 2,45, turun dari Tahun sebelumnya sebesar 2,51. Hal ini menunjukkan peningkatan kemampuan masyarakat miskin dalam memperoleh atau memenuhi kebutuhan dasarnya.

3.2.4. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Malaka dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada Grafik sebagai berikut :

Grafik Indeks Keperahan Kemiskinan Kabupaten Malaka
Periode: 2018-2022



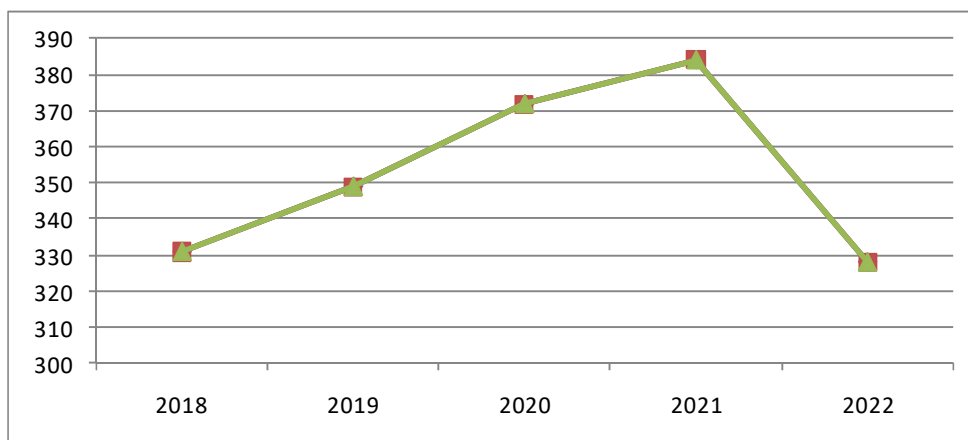
Sumber: BPS Kab. Belu (Malaka Dalam Angka)

Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Malaka pada Tahun 2022 sebesar 0,51, turun dari Tahun sebelumnya sebesar 0,60. Penurunan ketimpangan pengeluaran perkapita penduduk miskin, menunjukkan adanya perhatian Pemerintah Kabupaten Malaka terhadap penduduk miskin, melalui beberapa program bantuan kesejahteraan sosial yang sasarannya pada masyarakat miskin maupun pembangunan lainnya diberbagai sector.

3.2.5. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan di Kabupaten Malaka dalam 5 Tahun terakhir, dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 ditunjukkan pada Grafik sebagai berikut:

Grafik. Garis Kemiskinan Kabupaten Malaka, Periode: 2018-2022



Sumber: BPS Kab. Belu (Malaka Dalam Angka)

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Garis kemiskinan masyarakat Kabupaten Malaka pada Tahun 2022 sebesar Rp. 328.013, hal ini menunjukkan rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita dalam sebulan sebesar Rp.328.013. Penduduk di Kabupaten Malaka dikatakan miskin jika rata-rata pengeluarannya di bawah garis kemiskinan.

3.3.	Capaian Kinerja Tahunan
	Adapun capaian kinerja 11 (sebelas) urusan pemerintah yang dilaksanakan melalui DPPA Tahun Anggaran 2022 secara singkat dilihat pada matrix berikut ini:

Tabel Matrix Capaian Kinerja Tahunan per OPD Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2022

No.	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi	Target Tahun 2023		Sumber Pendanaan
										Kinerja	Pagu (Rp.)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
1.	Pendidikan	Perluasan Layanan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Pertama dan PAUD dari Kelompok Masyarakat Miskin	Meningkatnya Jumlah Anak Usia 5-15 Tahun dari Kelompok Keluarga Miskin yang mendapatkan Layanan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Pertama dan PAUD	Cakupan Anak Usia 5-15 Tahun dari Kelompok Keluarga Miskin yang memperoleh Layanan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Pertama dan PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah, Pembangunan Perpustakaan Sekolah, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Pengadaan Perlengkapan Sekolah, Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan, Penyelengar	Terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Baru, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah, Pembangunan Perpustakaan Sekolah, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Pengadaan Perlengkapan Sekolah, Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan,	Kab. Malaka	100 %	16.495.912.500	APBD

							aan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar				
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penambahan Ruang Kelas Baru, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah, Pembangunan Laboratorium, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Pengadaan Perlengkapan	Terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Baru, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah, Pembangunan Laboratorium, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah,	Kab. Malaka	100 %	15.367.902.000	APBD

						n Sekolah, Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik, dan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Sekolah, Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik, dan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					
						Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, dan Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terciptanya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, dan Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Malaka	100 %	3.533.534.000	APBD
					Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan Penataan	Terlaksananya Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan	Kab. Malaka	100 %	1.818.839.680	APBD

						PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
2.	Kesehatan	Perluasan layanan kesehatan dasar bagi kelompok masyarakat miskin	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan usia harapan hidup	Program Pemenuhan upaya kesehatan perorang an dan upaya kesehatan masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya, Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengadaan Obat, Vaksin, dan Pengadaan Bahan Habis Pakai	Terlaksananya Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya, Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengadaan Obat, Vaksin, dan Pengadaan	Kab. Malaka	100 %	28.343.859.916	APBD

								Bahan Habis Pakai				
						Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Pengelolaan Surveilans Kesehatan, Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, Operasional Pelayanan Puskesmas, Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya dan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terciptanya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Pengelolaan Surveilans Kesehatan, Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, Operasional Pelayanan Puskesmas, Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya dan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kab. Malaka	100 %	61.279.165.409	APBD

					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kab. Malaka	100 %	111.128.340	APBD
					Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten /Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar, Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terciptanya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar, Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Malaka	100 %	8.571.300.000	APBD
				Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya, Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Pengadaan Obat, Vaksin	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya, Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Pengadaan Obat, Vaksin	Kab. Malaka	100 %	22.981.418.372	APBD
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Operasional	Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Jaminan Kesehatan	Kab. Malaka	100 %	30.991.726.826	APBD

						UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Pelayanan Rumah Sakit, dan Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun (BLUD)	Masyarakat, Operasional Pelayanan Rumah Sakit, dan Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun (BLUD)				
3.	Sosial	Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan para pekerja sosial masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan para Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten /Kota	Program Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Penyediaan Sandang	Kab. Malaka	100 %	75.000.000	APBD
			Meningkatnya kualitas pelayanan di luar Panti Sosial	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS	Penyediaan Permakanan dan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terlaksananya Penyediaan Permakanan dan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Malaka	100 %	71.942.500	APBD

				Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial		dan NAPZA di Luar Panti Sosial						
		Pemberday aan Masyaraka t Desa dan Taruna Siaga Bencana Daerah	Meningkat nya Kualitas Pelayanan terhadap Fakir Miskin	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Program Penangana n Bencana	Pengelolaa n Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Malaka	100 %	1.854.210.000	APBD
			Masyaraka t Desa dan Taruna Siaga Bencana Daerah	Jumlah Masyaraka t Desa dan Taruna Siaga Bencana Daerah	Program Penangana n Bencana	Penyeleng garaan Pemberday aan Masyaraka t terhadap Kesiapsiag aan Bencana Kabupaten /Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terjalinnnya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Malaka	100 %	251.410.000	APBD
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peningkata n Peran Fungsi Lembaga Kemasyara katan, Lembaga Adat dan Masyaraka t Hukum	127 Desa	Peningkata n Peran Fungsi Lembaga Kemasyara katan, Lembaga Adat dan Masyaraka t Hukum	Progra m Admini strasi Pemerin tahan Desa	Pembinaan dan Pengawasa n Penyeleng garaan Administra si Pemerintah an Desa	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa, Penyelengga raan Pemilihan, Pengangkata n dan Pemberhenti an Kepala	Terlaksanan ya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa, Penyelengga raan Pemilihan, Pengangkata n dan	Kab. Malaka	100 %	3.791.682.000	APBD

		Adat dalam interaksi Sosial Kemasyarakatan di Desa		Adat dalam interaksi Sosial Kemasyarakatan di 127 Desa			Desa dan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Pemberhentian Kepala Desa dan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan	Terciptanya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan	Kab. Malaka	100 %	3.024.940.920	APBD

							Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	raan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					
5.	Pertanian	Perluasan akses RT petani/peternak miskin terhadap sarpras pertanian serta layanan penyuluhan Optimalisasi pemanfaatan sumber daya hewani bagi kelompok masyarakat miskin	Meningkatnya jumlah RT petani/peternak miskin yang mendapatkan layanan pendampingan dan penyuluhan usaha	Pemenuhan Cakupan rumah tangga petani/peternak miskin yang mendapatkan bantuan Sarana/Prasarana pertanian dan bibit ternak	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Malaka	100 %	12.112.543.950	APBD	
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Kab. Malaka	100 %	1.618.144.540	APBD	

						di Kecamatan serta sarana pendukungnya dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				
					Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya dan Pembangunan, Rehabilitasi dan	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya dan Pembangunan,	Kab. Malaka	100 %	8.949.554.000	APBD

						Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya						
						Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten /Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Malaka	100 %	226.940.000	APBD
						Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten /Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Malaka	100 %	306.160.000	APBD
						Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di	Terciptanya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan	Kab. Malaka	100 %	953.787.500	APBD

							Kecamatan dan Desa	Pertanian di Kecamatan dan Desa					
6.	Ketahanan Pangan dan Perikanan	Menunjang usaha Kelompok Nelayan dan Budidaya Ikan	Kelompok Nelayan dan Budidaya Ikan	Peningkatan kemampuan Kelompok Nelayan dan Budidaya Ikan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Malaka	100 %	61.930.720	APBD	
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten /Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malaka	100 %	13.370.000	APBD	
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Terwujudnya Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Malaka	100 %	183.150.000	APBD	

						Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota						
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malaka	100 %	441.124.761	APBD
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malaka	100 %	242.361.725	APBD
7.	Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh	Para Kelompok UMKM dan Pelaku ekonomi kerakyatan serta masyarakat luas yang	Membuka akses bagi Para Kelompok UMKM dan Pelaku ekonomi kerakyatan serta	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan	Kab. Malaka	100 %	70.566.025	APBD

		dan Mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi yang bermuara pada upaya pengentasan kemiskinan	ingin akan penciptaan lapangan kerja usaha yang seluas-luasnya	masyarakat luas yang ingin akan penciptaan lapangan kerja usaha yang seluas-luasnya		Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota		Kabupaten/Kota					
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pelaksanaan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Malaka	100 %	70.037.275	APBD	
8.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perluasan akses Rumah Tangga miskin terhadap pemenuhan	Peningkatan akses bagi Rumah Tangga miskin terhadap	Membuka ruang cakupan untuk akses Rumah Tangga	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya dan Pembangunan	Terlaksananya Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Malaka	100 %	894.888.205	APBD	

		n kebutuhan dasar serta optimalisasi sistem layanan pemanfaatan sumber daya masyarakat secara umum	memenuhi kebutuhan dasar serta optimalisasi sistem layanan pemanfaatan sumber daya masyarakat secara umum	miskin terhadap pemenuhan kebutuhan dasar serta optimalisasi sistem layanan pemanfaatan sumber daya masyarakat secara umum		Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	n Bangunan Perkuatan Tebing	dan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing				
						Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terwujudnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Malaka	100 %	2.530.918.966	APBD
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Malaka	100 %	8.692.122.639	APBD
						Program Pengelolaan dan Pengembangan	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan	Terlaksananya Pembangunan/ Penyediaan	Kab. Malaka	100 %	2.083.859.017	APBD

					dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Setempat	n Sub Sistem Pengolahan Setempat				
					Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan, Pembangunan Jalan, dan Pemeliharaan Rutin Jalan	Terciptanya Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan, Pembangunan Jalan, dan Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Malaka	100 %	34.875.090.910	APBD
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Malaka	100 %	65.623.900	APBD
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kab. Malaka	100 %	52.630.000	APBD

						en/Kota						
					Program Penyele nggaraan Penataa n Ruang	Koordin asi dan Sinkroni sasi Perencan aan Tata Ruang Daerah Kabupat en/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Malaka	100 %	1.333.128.000	APBD
9.	Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	Penjamina n akses layanan jumlah Rumah Tangga Miskin yang terdata dalam Sistem Informasi Kependud ukan	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang terdata dalam Sistem Informasi Kependud ukan	Meningkat nya jumlah Rumah Tangga Miskin yang terdata dalam Sistem Informasi Kependud ukan	Program Pendaftara n Penduduk	Pelayanan Pendaftara n Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Kualitas dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Malaka	100 %	451.270.000	APBD
					Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan Kualitas dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Malaka	100 %	124.610.000	APBD
					Program Pengelolaa n Informasi Administra si Kependud ukan	Pembinaan dan Pengawasa n Pengelolaa n Informasi Administra si Kependud ukan	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Malaka	100 %	29.920.000	APBD
10.	Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,	Penjamina n akses layanan jumlah	Jumlah Rumah Tangga Miskin	Meningkat nya jumlah Rumah	Progra m Penge n dalian	Pemetaan Perkiraan Pengendali an	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Terwujudnya Penyediaan Data dan Informasi	Kab. Malaka	100 %	91.329.200	APBD

	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rumah Tangga Miskin yang terdata dalam Sistem Informasi Kependudukan	yang terdata dalam Sistem Informasi Kependudukan	Tangga Miskin yang terdata dalam Sistem Informasi Kependudukan	Penduduk	Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	dan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Keluarga dan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi Program KKBPk kepada Stakeholders dan Mitra Kerja, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPk sesuai Kearifan Budaya Lokal, Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang, Pelaksanaan	Terlaksananya Advokasi Program KKBPk kepada Stakeholders dan Mitra Kerja, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPk sesuai Kearifan Budaya Lokal, Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang,	Kab. Malaka	100 %	623.541.500	APBD

						Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok), Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK dan Pengendalian Program KKBPK	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok), Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK dan Pengendalian Program KKBPK					
						Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Peningkatan Kapasitas Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Malaka	100 %	608.424.000	APBD
						Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi	Terwujudnya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat	Kab. Malaka	100 %	294.050.000	APBD

						<p>Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten /Kota</p> <p>dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya</p>	<p>Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya</p>				
						<p>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten</p> <p>Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB</p>	<p>Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB</p>	Kab. Malaka	100 %	292.825.000	APBD

						/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKS)	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKS)	Kab. Malaka	100 %	1.222.660.000	APBD
11.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (rumah, sanitasi, air bersih, listrik dan akses terhadap	Berkurangnya angka kemiskinan	presentase penduduk dibawah garis kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan (poin), inde	Program Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kab. Malaka	100 %	2.550.000	APBD

		pangan bergizi		ks kedalaman kemiskinan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Terwujudnya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Malaka	100 %	6.986.409.000	APBD
--	--	----------------	--	-------------------------	---	--------------------------------------	--	--	-------------	-------	---------------	------

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT

Bab ini mendiskusikan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka kedepan. Rencana tindak lanjut ini dirumuskan berdasar pembahasan pada Bab-Bab sebelumnya, khususnya berkenaan dengan hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan yang telah didiskusikan pada Bab II maupun data Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan pada Bab III. Adapun rencana tindak lanjut dari Laporan ini meliputi:

1. Optimalisasi konvergensi program/kegiatan dan anggaran penanganan kemiskinan

Dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Malaka, berbagai upaya telah dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait. Pada Bab 3 telah diuraikan program/kegiatan beserta realisasinya, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait. Berdasarkan paparan data dimaksud, tampak bahwa upaya mengintervensi kemiskinan telah dilakukan secara serius sejauh ini. Berbagai program/kegiatan telah diupayakan untuk mengintervensi secara simultan penduduk miskin yang ada di Kabupaten Malaka. Intervensi dimaksud dapat dikategorikan kedalam 2 (dua) bentuk, yakni: 1) Penguatan jarring pengaman sosial (*social safety nets*), yang mana berfungsi sebagai “jarring penahan” bagi orang miskin untuk tidak terseret masuk lebih ke dalam jebakan kemiskinan (*poverty trap*). Intervensi ini terefleksi dari adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota kepada penduduk miskin ekstrim di Kabupaten Malaka. Dengan menerima bantuan dimaksud, penduduk miskin diharapkan memiliki peningkatan pendapatan/kemampuan konsumsi agar tidak terseret ke dalam kondisi kemiskinan yang semakin dalam/parah. 2) Peningkatan kapabilitas penduduk miskin. Intervensi ini terefleksi dari berbagai program/kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapabilitas penduduk miskin untuk jangka pendek maupun panjang. Untuk jangka pendek, misalnya, melalui perluasan akses pembiayaan usaha produktif seperti yang dilakukan pada program Swasembada Pangan. Melalui intervensi program ini, pemerintah memperluas akses langsung bagi penduduk miskin untuk dapat meningkatkan skala ekonomi yang bermuara pada peningkatan kapabilitas ekonomi dari penduduk miskin. Sedangkan untuk jangka panjang, misalnya, melalui pemberian makanan tambahan kepada bayi/ibu hamil dari keluarga miskin. Intervensi ini bertujuan agar anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang berada dalam kondisi miskin saat ini dapat memperoleh asupan gizi yang memadai sebagai salah satu prasyarat untuk dapat tumbuh kembang secara sehat. Dengan kondisi demikian, setelah dewasa, anak-anak tersebut diharapkan dapat memiliki kapabilitas untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja atau tidak lagi mewarisi kondisi miskin dari orang tuanya sebagai akibat tidak mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja.

Meski demikian, tampak pula bahwa konvergensi berbagai program/kegiatan dimaksud masih perlu dioptimalkan guna memberi dampak yang lebih signifikan bagi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Malaka. Sebagaimana tampak pada Bab 2 maupun 3, aktor-aktor yang terlibat dalam intervensi yang telah dilakukan masih perlu diperluas. Selain itu, realisasi program/kegiatan yang ada masih terkendala dengan adanya refocusing anggaran maupun masih kurang sinkron dalam menyasar individu yang ditargetkan.

Untuk itu, tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap persoalan-persoalan ini yakni optimalisasi konvergensi program/kegiatan dan anggaran penanganan kemiskinan. Berbagai program/kegiatan akan ditingkatkan kesolidannya sehingga daya tembus terhadap persoalan kemiskinan akan diupayakan untuk semakin meningkat. Sebagai misal, disaat ini sedang diinisiasi pembuatan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang di-*overlay* dengan data kemiskinan pada Kabupaten Malaka. Hal ini merupakan salah satu contoh langkah konkrit untuk meningkatkan focus dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Malaka.

2. Terus mendorong peningkatan permintaan agregat (*agregat demand*) pada skala kabupaten;

Permintaan agregat bekerja dalam ruang makro. Jika kebijakan *pro-poor* (sebagaimana telah didiskusikan pada poin 1 (satu)) bekerja secara inklusif pada ruang spesifik, yang mana khusus mensasar penduduk miskin secara langsung maka peningkatan permintaan agregat akan mensasar keseluruhan penduduk di Kabupaten Malaka. Secara konseptual, peningkatan permintaan agregat akan menstimulasi peningkatan pendapatan penduduk miskin atau dalam ilmu ekonomi pembangunan dikenal dengan prinsip *spill-over/trickledown effect*. Peningkatan skala ekonomi desil menengah ke atas akan menstimulasi peningkatan skala ekonomi bagi desil bawah. Dengan meningkatnya pendapatan penduduk kelas menengah maka (*ceteris paribus*, dengan asumsi variable lainnya konstan), permintaan agregat, khususnya kelas menengah juga akan meningkat. Peningkatan kemampuan konsumsi ini akan mendorong permintaan barang/jasa yang di-*supply* oleh para produsen, termasuk penduduk miskin. Sebagai misal, dengan meningkatnya pendapatan/skala ekonomi dari kelas menengah maka sayuran di pasar yang dipasok oleh penduduk miskin akan meningkat permintaannya dan implikasinya, pendapatan penjual sayur tersebut akan meningkat pula.

Selanjutnya, secara tidak langsung, peningkatan permintaan agregat ini akan memperbesar ruang fiskal yang berfokus pada anggaran pengentasan kemiskinan. Permintaan akan barang dan jasa akan meningkatkan penerimaan daerah, baik dari pajak maupun retribusi. Implikasinya, Pemerintah akan memainkan fungsi redistribusi yang semakin solid karena penerimaan daerah yang dikumpulkan dari desil menengah ke atas akan semakin banyak untuk didistribusi kepada penduduk miskin melalui skema/program “pro-poor”.

Pra kondisi yang akan dilakukan/ tindak lanjut untuk mendorong permintaan agregat yakni dengan menyediakan kondisi yang kondusif bagi bekerjanya mekanisme pasar di Kabupaten Malaka. Hal ini mencakup kebijakan moneter dan fiskal yang dimainkan berbagai pemangku kepentingan. Terkait fiskal, misalnya, infrastruktur dasar untuk mendorong konsumsi, seperti jalan dan jembatan, akan terus ditingkatkan kualitasnya. Selanjutnya, terkait moneter, berbagai kebijakan makro, seperti pengendalian inflasi, akan terus diinisiasi oleh Pemerintah Daerah. Inflasi yang terkendali akan menjamin kondisi ekonomi yang stabil untuk memastikan aktivitas produsen dan konsumen di Kabupaten Malaka terus bergeliat dan dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang inklusif terus terjadi kedepan.

3. Mendorong penyediaan data kemiskinan yang tunggal, akurat dan berkesinambungan

Data penduduk miskin merupakan persoalan klasik yang akan terus didorong keakuratan dan ketersediaannya secara berkesinambungan. Data terus menjadi tantangan bagi para pemangku kepentingan karena keakuratannya selalu ditemui di lapangan. Dalam penyaluran Bantuan untuk Penanganan Kemiskinan Tahun 2022 di Kabupaten Malaka, misalnya, hasil monitoring dan evaluasi kegiatan ini menemukan bahwa *Inclusion/exclusion errors* selalu ditemui dalam basis data kemiskinan. Hal ini disebabkan karena terdapat penduduk terkategori tidak miskin namun terdata sebagai penduduk miskin (*inclusion errors*). Demikian pula sebaliknya dimana terdapat penduduk miskin yang tidak dimasukkan kedalam basis data penerima bantuan penanganan kemiskinan ekstrem (*exclusion errors*). Selain itu, ditemui pula bahwa masih banyak penduduk miskin yang terdata sebagai Penerima Manfaat (*beneficiaries*) yang memiliki data kependudukan yang bermasalah, seperti NIK yang tidak terbaca pada basis data DitjenDukcapil, Kemendagri.

Guna mengintervensi persoalan seperti ini, sesungguhnya Pemerintah Pusat telah berupaya merumuskan kebijakan yang relevan. Data kemiskinan berbasis individu (*by name by address*) yang selama ini digunakan yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), telah dilengkapi dengan Data Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data P3KE merupakan data subset dari data PK-BKKBN 2021 yang telah diberikan rangking dan divalidasi dengan data NIK oleh DitjenDukcapil Kemendagri. Hadirnya kebijakan ini berupaya mengeliminir persoalan klasik terkait keakuratan data.

Namun demikian, masih ditemui pula bahwa kebijakan terkini terkait peningkatan keakuratan basis data kemiskinan masih menyisakan sejumlah persoalan. Berdasarkan Susenas BPS, Maret 2021, masih banyak penduduk miskin (desil 1-4) yang tidak memperoleh intervensi pemerintah, seperti BLT, dan sebaliknya, masih terdapat penduduk pada desil menengah atas yang menerimanya. Persoalan krusial lainnya yakni cakupan (*coverage*) pendataan penduduk miskin masih belum komprehensif. Data P3KE yang melengkapi DTKS hanya mencakup 82,78% penduduk Indonesia atau hanya mendata 225.338.582 jiwa dari total 272.229.372 total jiwa per 31 Juni 2021. Hal ini mengindikasikan pula bahwa belum seluruh penduduk Nusa Tenggara Timur yang terdata pada P3KE. Implikasinya adalah persoalan *inclusion/exclusion errors* akan tetap tinggi dalam konteks Nusa Tenggara Timur dan lebih khusus Kabupaten Malaka.

Persoalan selanjutnya yang erat kaitannya dengan basis data kemiskinan saat ini adalah kesinambungan pendataan. Di satu sisi, basis data P3KE yang ada saat ini telah menyediakan informasi yang berarti terkait desil/kelompok ekonomi penduduk yang selanjutnya melengkapi basis data yang disediakan oleh DTKS. Meski demikian, di lain sisi, persoalan yang selanjutnya ditemui adalah kesinambungan ketersediaan data, yang mana sangat dibutuhkan dalam perumusan kebijakan. Basis data yang tersedia secara berkesinambungan (*time series*) dapat menyediakan informasi berupa tren/fluktuasi data. Hadirnya P3KE diharapkan melengkapi DTKS yang menjadi basis data kemiskinan saat ini namun di saat ini pula, Regsosek didesain untuk menjadi basis data tunggal untuk

penanggulangan kemiskinan kedepan. Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa kesinambungan data masih menjadi persoalan saat ini.

Berdasarkan uraian pada poin 2 ini, dapat dikemukakan bahwa tindak lanjut yang akan dilakukan kedepan yakni penyediaan data kemiskinan yang akurat, komprehensif dan berkesinambungan akan terus didorong. Pada berbagai forum atau media, akan dikemukakan kepada para pemangku kepentingan terkait agar data yang dihasilkan dapat ditingkatkan keakuratannya. Misalnya, berkenaan dengan data P3KE, kader BKKBN akan terus didorong agar persoalan *inclusion/ exclusion errors* terus diminimalisir. Hal ini dapat dilakukan dengan pencacahan secara teliti, rutin dan menyeluruh pada setiap rumah tangga. Peningkatan keakuratan ini akan menjadi lebih akseleratif apabila turut dilakukan oleh Perangkat Daerah pada setiap Kabupaten/Kota. Selain itu, P3KE, DTKS, dan data Regsosek agar diintegrasikan agar kesinambungan data menjadi lebih baik ke depan.

Dengan tersedianya basis data kemiskinan yang solid, tentunya, para pemangku kepentingan akan semakin mudah dalam mengintegrasikan berbagai program/kegiatan dan anggaran untuk mengintervensi setiap individu yang menjadi target intervensi. Pada muaranya, aksi korvergen ini akan memberi daya dorong yang semakin besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Malaka.

4. Mendorong penggunaan metode penghitungan yang seragam/paralel

Metode penghitungan kemiskinan juga menjadi persoalan klasik dan krusial dalam agenda pengentasan kemiskinan di Indonesia. Metode penghitungan menjadi sangat penting karena menjadi basis dalam mengukur tingkat dan tren kemiskinan suatu wilayah yang selanjutnya menjadi justifikasi untuk tindak lanjut penanganan kemiskinan kedepan. Sejauh ini, metode pengukuran yang telah digunakan di Indonesia adalah metode pengukuran dengan pendekatan moneter. Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dalam hal kapasitas moneter untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non-pangan. Melalui lensa ini, penduduk yang miskin secara moneter didefinisikan sebagai mereka yang memiliki konsumsi bulanan rata-rata di bawah garis kemiskinan, yang, misalnya, ditetapkan pada Rp 392.154 (US \$ 27) pada bulan September 2018.

Belakangan ini, Pemerintah mengembangkan dan mengaplikasikan basis data kemiskinan (P3KE) dengan metode pengukurannya sendiri untuk memotret penduduk miskin. Berbeda dengan DTKS, P3KE menyajikan desil untuk mengklasifikasikan tingkat pendapatan seluruh penduduk Indonesia. Berdasarkan metode dimaksud, keparahan/kedalaman kemiskinan dapat terpotret secara baik pada setiap rumah tangga. Hal ini selanjutnya memudahkan intervensi kebijakan secara langsung kepada individu-individu dalam rumah tangga miskin.

Pemerintah juga sedang melaksanakan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di seluruh provinsi di Indonesia. Pendataan Regsosek adalah pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Regsosek adalah upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal, atau satu data. Dengan menggunakan data tunggal, pemerintah dapat melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien. Meski terus berupaya menyajikan data yang solid sebagai basis kebijakan penanggulangan kemiskinan, tersedianya basis data kemiskinan yang beragam dari

berbagai instansi ini tentu berpotensi menimbulkan persoalan lain.

Pertama, daerah akan kesulitan dalam mengintervensi program/kegiatan di lapangan. Beragamnya data yang ada membuat daerah menjadi bingung karena DTKS dirilis oleh Kementerian Sosial RI sebagai basis data intervensi kemiskinan yang terkait, seperti PKH dan beberapa jenis bansos. Terkini, dalam mengintervensi persoalan penduduk miskin ekstrim, basis data yang digunakan adalah P3KE yang disediakan oleh BKKBN. Di saat bersamaan, BPS juga sedang mengembangkan Regsosek yang ditujukan untuk mendukung intervensi pemerintah di bidang pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, hingga administrasi kependudukan. Keragaman basis data ini akan meningkatkan potensi *inclusion/ exclusion errors*. “Siapa itu orang miskin” akan berbeda definisinya sehingga salah satu basis data bisa saja mengidentifikasi penduduk A sebagai penduduk miskin, sedangkan basis data lainnya tidak.

Kedua, kesulitan dalam mengevaluasi efektivitas dari intervensi yang telah dilakukan. Selama ini, daerah mengevaluasi tingkat keefektifan dari intervensi terkait penanganan kemiskinan dengan mengacu pada metode pengukuran kemiskinan dengan pendekatan moneter yang dirilis oleh BPS. Hal ini menjadi soal karena DTKS dan P3KE mengukur kemiskinan dengan dimensi yang lebih beragam (multi dimensi) sehingga tidak paralel antara basis data kemiskinan dan data yang dievaluasi. Dalam DTKS dan P3KE, variabel yang terdapat dalam data set yang ada bukan saja meliputi tingkat pendapatan/pengeluaran, tetapi juga mencakup dimensi lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. **Ketiga**, terjadinya inefisiensi. Basis data yang dikembangkan secara bersamaan oleh tiga instansi ini berpotensi besar menimbulkan pemborosan anggaran.

Sehubungan dengan itu, tindak lanjut kedepan yang akan dilakukan adalah pemerintah pusat akan terus didorong untuk menggunakan metode penghitungan yang seragam/paralel.

5. Strategi Penyusunan Dokumen RPKD Kabupaten Malaka

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) merupakan sebuah dokumen yang memuat strategi dan arah kebijakan makro penanggulangan kemiskinan pada sebuah daerah. Dokumen ini selanjutnya menjadi panduan untuk perumusan strategi dan program yang dituangkan ke dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) maupun menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Malaka. Untuk itu penyusunan dokumen RPKD adalah salah satu rencana tindak lanjut ke depan. Selain itu, berbagai pihak terkait juga didorong untuk memfasilitasi penyusunan dokumen RPKD Kabupaten Malaka. Harapannya, dengan hadirnya dokumen ini, integrasi atau konvergensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di level Kabupaten Malaka akan semakin solid.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Malaka, merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Malaka dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat untuk percepatan Penanggulangan kemiskinan di daerah.

Dokumen ini memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam komitmen global yang tertuang dalam Millenium Development Goal's (MDG's), serta arahan perencanaan nasional (RPJPN/RPJMN) dan arahan perencanaan pembangunan di daerah tingkat provinsi (RPJPD/RPJMD Provinsi) dan arahan perencanaan pembangunan di daerah tingkat kabupaten (RPJPD/RPJMD Kabupaten). Dengan demikian maka Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang telah tertuang dalam dokumen ini perlu dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan/pelaksanaan serta pengevaluasian program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Malaka.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan hasil analisa pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

Capaian Indikator Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Malaka:

1. RPJMD menargetkan penurunan tingkat kemiskinan penduduk di Kabupaten Malaka tahun 2020 (18,00%); tahun 2021(17,35%); dan Tahun 2022 (16,15%). Sesuai data BPS persentase penduduk miskin di Kabupaten Malaka tahun 2019 (16,12%), tahun 2020 (16,04%) dan tahun 2021 sebesar 16,15%, selama periode 2020-2021 terjadi peningkatan persentase penduduk miskin di Kabupaten Malaka sebesar 0,11% akibat pandemi covid-19;
2. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Malaka yang masih tinggi dipengaruhi oleh beberapa kondisi antara lain : Badai Seroja, fenomena pandemi covid-19 dan faktor ekonomi lainnya;
3. Berdasarkan data BPS pada September 2021, indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Malaka sebesar 0,60 dimana capaian jauh di bawah P2 nasional yakni sebesar 0,42. Tingkat keparahan kemiskinan (P2) yang semakin kecil mengindikasikan kondisi yang lebih baik dan sebaliknya, semakin besar P2 menunjukkan adanya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin yang besar.

Penjabaran 4 prioritas daerah Kabupaten Malaka yang mendukung penanggulangan kemiskinan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malaka 2021-2026, dijabarkan dalam program-program prioritas pada RKPD 2022 sebagai berikut:

- Prioritas Pertama : Percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan prevalensi stunting, dijabarkan ke dalam 26 program dan 48 kegiatan yang dilaksanakan oleh 11 Perangkat Daerah;
- Prioritas Kedua : Peningkatan Pendapatan Masyarakat, dijabarkan ke dalam 9 program dan 21 kegiatan yang dilaksanakan oleh 4 Perangkat Daerah;
- Prioritas Ketiga : Peningkatan Infrastruktur Dasar, Rumah, Jalan, Air, dan Transportasi, dijabarkan ke dalam 8 program dan 11 kegiatan yang dilaksanakan oleh 4 Perangkat Daerah;
- Prioritas Keempat : Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan, dijabarkan ke dalam 9 program dan 16 kegiatan yang dilaksanakan oleh 3 Perangkat Daerah;

5.2 Rekomendasi

Hal-hal yang perlu direkomendasikan dalam laporan ini, sebagai berikut :

1. Perlu adanya konsistensi dan keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah terkait dengan rencana aksi penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi NTT dan nasional;
2. Perlu koordinasi intens antara TKPK dengan Perangkat Daerah terkait guna terwujudnya kolaboratif serta kesinergian aktivitas kegiatan yang lebih focus untuk optimisasi capaian target indikator program/kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah;
3. Perlu komitmen dan kesinergian antara rencana aksi penanggulangan kemiskinan provinsi dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan kabupaten;
4. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terkait perlu memperhatikan proporsi belanja pada aktivitas kegiatan yang langsung berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan, perlu mendapat pembiayaan yang lebih dibandingkan dengan proporsi belanja untuk aktivitas kegiatan yang tidak langsung/penunjang;
5. Perlu koordinasi yang lebih intens antara TKPK nasional dan daerah guna penyelarasan data dan rencana aksi daerah;
6. Rapat koordinasi TKPKD Kabupaten Malaka setidaknya dilakukan 2 kali dalam setahun;
7. TKPKD Kabupaten Malaka perlu melakukan monitoring pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan Perangkat Daerah terkait;
8. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah terkait perlu memperhatikan aspek kewenangan;
9. Perlu kesinergian dalam pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pusat, daerah maupun lembaga mitra (NGO);

10. Perlu pengalokasian sumber daya dalam membangun sistem pemantauan dan evaluasi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malaka;
11. Kegiatan monitoring dan evaluasi adalah hal kunci yang penting untuk diperhatikan.